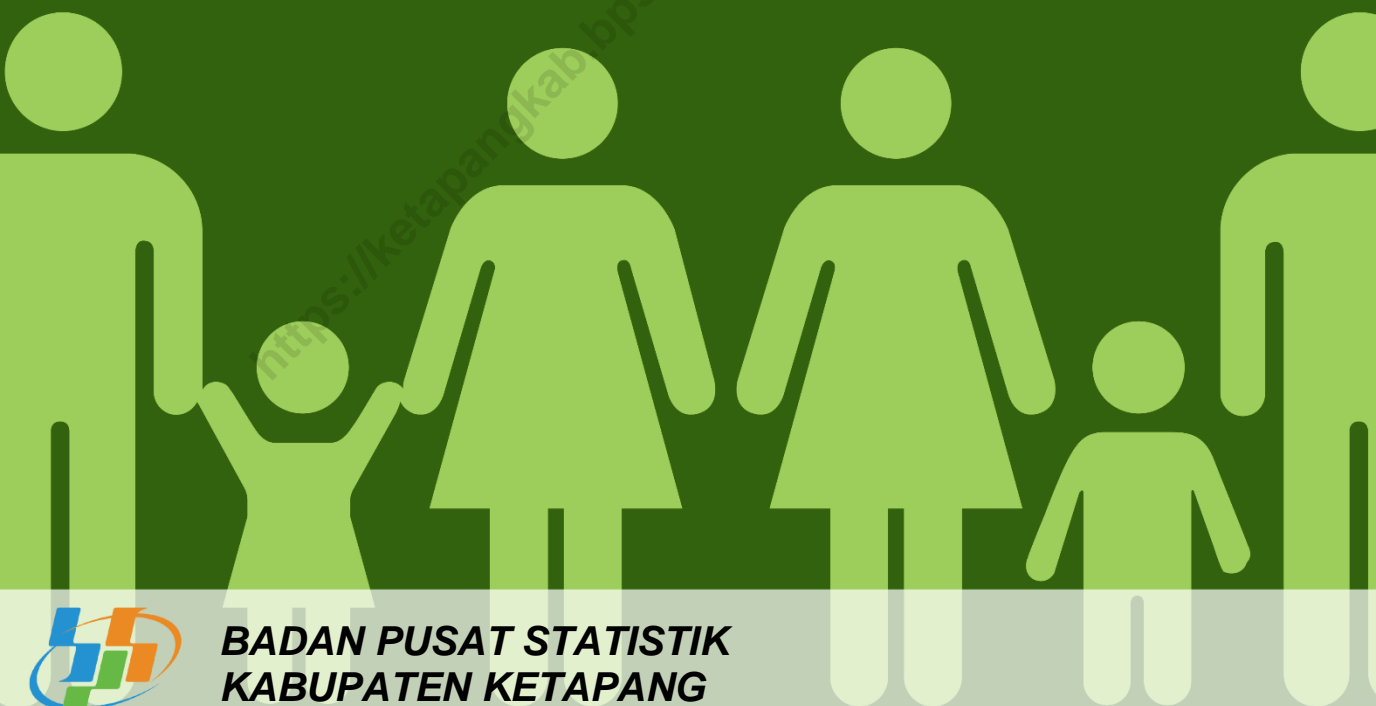


INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

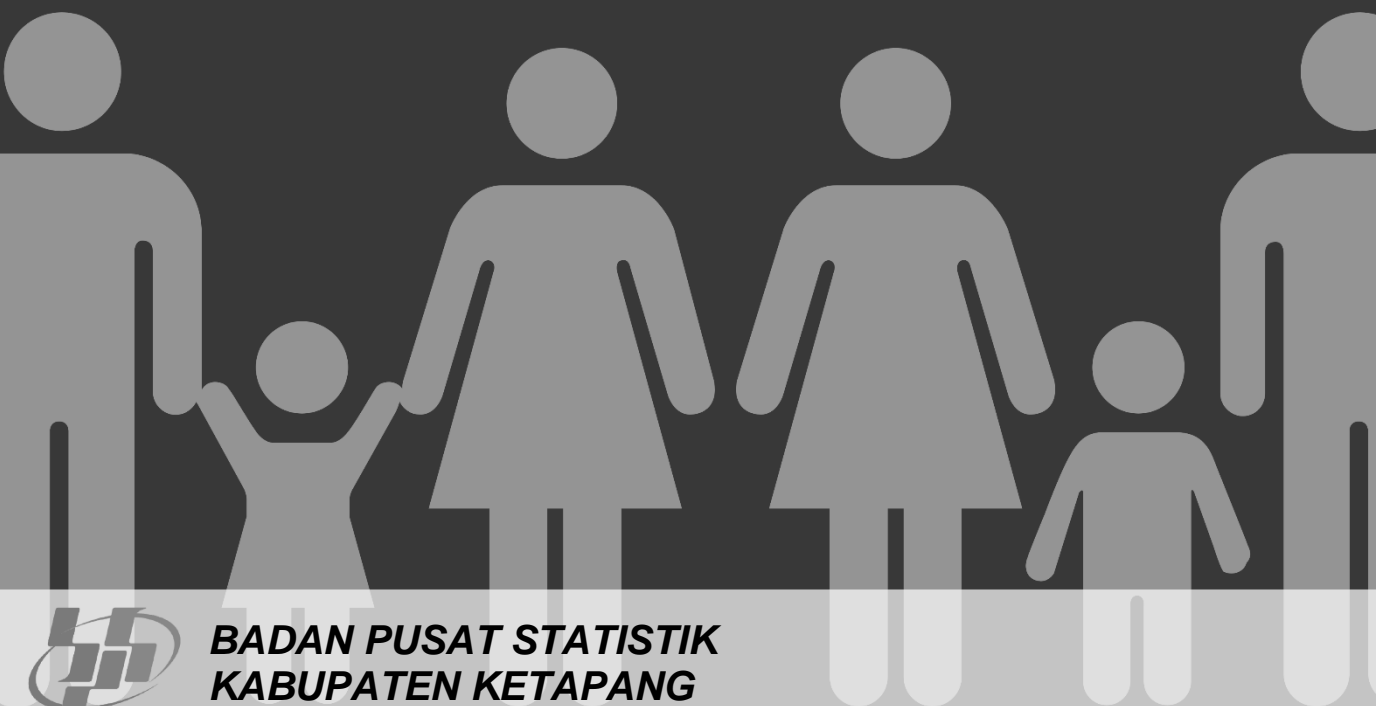
2021



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

2021

<https://ketapangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KETAPANG**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KETAPANG 2021

ISSN/ISBN: -

No. Publikasi:

Katalog: 4102004.6106

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 95

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ketapang 2021

Penanggung Jawab :

Agus Hartanto SE, M.Eng., M.Sc.

Editor :

Musipah, SST.

Penulis dan Pengolah Data :

Mega Yuniarti, S.Tr.Stat.

Desain dan Infografis :

Mega Yuniarti, S.Tr.Stat.

<https://kebangkalan.go.id>

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ketapang 2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Ketapang antar waktu dan perbandingan antar kecamatan. Data yang digunakan antara lain bersumber dari hasil Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang terukur berdasarkan data yang tersedia. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Fertilitas, Perumahan, Konsumsi dan Pengeluaran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi di masa mendatang sangat kami harapkan.

Ketapang, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Ketapang



Agus Hartanto SE, M.Eng., M.Sc.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
PENDAHULUAN	xiii
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
KONSEP DAN DEFINISI	7
2.1 Kependudukan.....	9
2.2 Ketenagakerjaan	11
2.3 Pendidikan	16
2.4 Kesehatan	19
2.5 Konsumsi dan Pengeluaran.....	21
KEPENDUDUKAN	23
3.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin..	26
3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	27
3.3 Komposisi Umur Penduduk.....	28
3.4 Rasio Ketergantungan.....	30
3.5 Status Perkawinan	30
PENDIDIKAN	33
4.1 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)	36
KETENAGAKERJAAN	41

5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	44
5.2	Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektoral	46
5.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama	47
KESEHATAN		51
6.1	Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)	54
6.2	Jaminan Kesehatan	55
FERTILITAS 57		
7.1	Pemakaian Alat KB	59
PERUMAHAN		65
8.1	Status Kepemilikan	68
8.2	Sumber Air Utama	69
8.3	Sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK)	70
KONSUMSI DAN PENGELUARAN		73
9.1	Pengeluaran rumah tangga	76
9.2	Kondisi kemiskinan kabupaten ketapang 2021	79
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		85
10.1	Perkembangan IPM Ketapang Tahun 2012-2021	89
10.1.1	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	91
10.1.2	Dimensi Pengetahuan	91
10.1.3	Dimensi Standar Hidup Layak	92
10.2	Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota	93

DAFTAR TABEL

Halaman

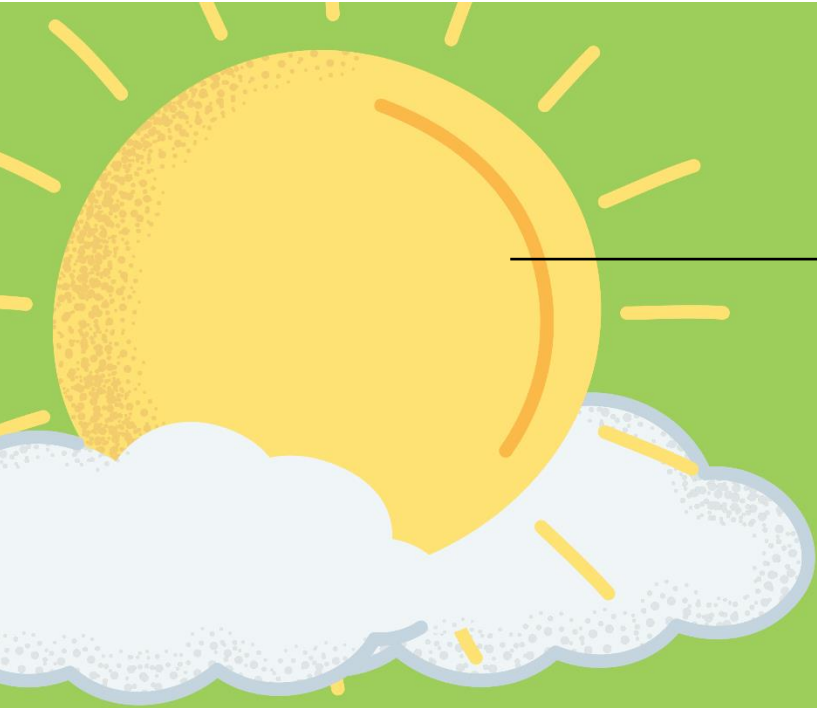
BAB III KEPENDUDUKAN

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Ketapang, 2017-2021	26
Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Ketapang Menurut Kecamatan, 2021.....	28
Tabel 3.3. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Ketapang, 2021	30
Tabel 3.4. Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ketapang, 2021	31
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ketapang, 2021	37
Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Ketapang Tahun 2021..	38
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Ketapang, 2021.....	39
Tabel 5.1. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Ketapang, 2021	45
Tabel 5.2. Persentase TPAK dan TPT Kabupaten Ketapang, 2021	46
Tabel 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ketapang, 2021.....	49
Tabel 6.1. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Ketapang, 2021.....	55
Tabel 6.2. Presentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Ketapang, 2021	56
Tabel 7.1. Persentase Penduduk Umur 0 – 59 Bulan (balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ketapang, 2021.....	61

Tabel 7.2. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Ketapang, 2021	62
Tabel 7.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Riwayat Melahirkan di Kabupaten Ketapang, 2021.....	62
Tabel 8.1. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Sumber Utama Memasak dan MCK, 2021.....	70
Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2021	71
Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Jenis Kloset, 2021	72
Tabel 9.1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Di Ketapang, 2021	77
Tabel 9.2. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Ketapang, 2021.....	78
Tabel 9.3. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Ketapang, 2021.....	79
Tabel 9.4. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, 2021	81
Tabel 10.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketapang Menurut Komponen, 2012-2021.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB III KEPENDUDUKAN	
Gambar 3.1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ketapang menurut Jenis Kelamin, 2017-2021.....	27
Gambar 3.2. Piramida Penduduk Kabupaten Ketapang (Ribu Jiwa), 2021	29
Gambar 5.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Ketapang, 2021.....	47
Gambar 7.1. Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun Menurut Penggunaan Alat KB di Kabupaten Ketapang, 2021	60
Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Penguasaan Tempat Tinggal, 2021.....	69
Gambar 9.1. Tren Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, 2018-2021.....	83
Gambar 10.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketapang, 2012-2021	90
Gambar 10.2. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Ketapang, 2012-2021.....	91
Gambar 10.3. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Ketapang, 2012-2021.....	92
Gambar 10.4. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2012-2021 (Rp000)	93
Gambar 10.5. IPM Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021	94



PENYAKIT LUHAN



<https://ketapainews.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menentukan strategi pembangunan yang ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, agar pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih merata dan memadai. Tujuan utama pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya manusia, luas wilayah, serta potensi alam yang ada mengakibatkan pencapaian hasil-hasil pembangunan di masing-masing wilayah berbeda.

Dalam hal pembangunan ini, kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang ada memiliki peran penting dalam memajukan suatu daerah. Kualitas penduduk sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal meliputi suasana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kebijakan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Untuk dapat menilai kualitas penduduk diperlukan indikator ataupun ukuran yang dapat menunjukkan kondisi penduduknya.

Badan Pusat Statistik dalam hal ini BPS Kabupaten Ketapang menerbitkan publikasi yang dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Ketapang. Indikator-indikator yang digunakan

adalah indikator kondisi demografi, pendidikan, kegiatan ekonomi, keluarga berencana, kualitas kesehatan, dan juga kondisi perumahan serta rata-rata pengeluaran sebulan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan ini adalah masalah kependudukan dan angkatan kerja di Kabupaten Ketapang keadaan tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan publikasi ini ialah:

- a. Memberikan gambaran tentang jumlah penduduk berikut karakteristiknya di Kabupaten Ketapang tahun 2021.
- b. Memberikan gambaran kondisi angkatan kerja di Kabupaten Ketapang tahun 2021.
- c. Memberikan gambaran kondisi pendidikan secara umum, kesehatan dan perumahan, serta keluarga berencana.
- d. Memberikan gambaran pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam beberapa bab sesuai dengan pengelompokan indikator ditambah pendahuluan sebagai bab 1 dan bab 2 konsep definisi. Indikator yang disajikan mencakup 8 (delapan) kelompok indikator yang dijadikan judul bab dalam tulisan ini.

Adapun penyusunan bab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Konsep Definisi

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar kependudukan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

Bab 3. Kependudukan

Pada bab ini diuraikan tentang jumlah penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi umur penduduk, rasio ketergantungan dan status perkawinan.

Bab 4. Pendidikan

Bab ini memuat informasi, angka partisipasi sekolah, dan angka melek huruf

Bab 5. Ketenagakerjaan

Bab ini berisi penjelasan mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektoral, dan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama.

Bab 6. Kesehatan

Bab ini merinci informasi mengenai keluhan kesehatan, angka kesakitan, dan penggunaan kartu jaminan kesehatan.

Bab 7. Fertilitas dan KB

Bab ini memberi informasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi, dan Imunisasi pada balita serta penolong kelahiran pada bayi.

Bab 8. Perumahan

Bab ini diuraikan informasi mengenai status kepemilikan rumah, sumber penerangan, sumber air minum serta sarana mandi, cuci, dan kakus.

Bab 9. Konsumsi dan Pengeluaran

Pada bab ini menjelaskan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan selama sebulan serta kemiskinan.

Bab 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada bab ini diuraikan informasi terkait IPM tahun 2021.

<https://ketapangkab.bps.go.id>



KONSEP DAN DEFINISI



KONSEP DAN DEFINISI

2.1 Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. **Pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan rata-rata penambahan penduduk per tahun pada periode/waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Umur seseorang dapat diketahui apabila tanggal, bulan dan tahun kelahirannya diketahui. Didalam pencacahan ditanyakan tanggal kelahiran setiap orang dan harus dinyatakan dengan Kalender Masehi. Berdasarkan tanggal kelahiran ini maka umur seseorang dapat diketahui. Didalam penghitungan umur untuk keperluan sensus atau survey, umur seseorang harus selalu dibulatkan ke bawah atau menurut ulang tahun terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, maka perkiraan umur perkiraan umur dihubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik yang bersifat nasional maupun daerah, misalnya Proklamasi Kemerdekaan RI (1945), dan Pemilihan Umum Pertama (1955).

Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun penggolongan status perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- Belum kawin adalah status dari mereka yang belum terikat dalam perkawinan.
- Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.
- Cerai hidup adalah status dari mereka yang telah bercerai dengan suami/isterinya dan belum kawin lagi.
- Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/isterinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Tamat pendidikan adalah selesai mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu sekolah sampai akhir dengan mendapat tanda tamat/ijazah baik dari sekolah negeri maupun swasta. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi ia mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Pendidikan yang ditamatkan dapat dibagi menjadi 7 golongan, yaitu:

- Tidak/belum punya ijazah
- Tamat Sekolah Dasar
- Tamat Sekolah Menengah Pertama Sederajat
- Tamat Sekolah Menengah Atas Sederajat
- Diploma I/II
- Akademi/Diploma III

- Universitas adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan sarjana, pasca sarjana, Doktor, Diploma IV dan V, atau spesialisasi I dan II pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi. Program akta IV dan V sejajar dengan jenjang Diploma IV dan V.

2.2 Ketenagakerjaan

Penduduk pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (usia 0-14 tahun). Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbedaannya didasarkan pada kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu pada saat pendataan.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiunan, penerima transfer, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Tenaga kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Pada dasarnya tenaga kerja dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja (*labor force*) adalah mereka yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen,

dan pegawai yang sedang cuti. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja

Penduduk yang bekerja adalah :

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh putus.
- b. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi mereka adalah :
 - Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang tidak masuk karena cuti, sakit, dan sebagainya.
 - Petani yang menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah.
 - Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat, dalang, dan sebagainya.

Mencari pekerjaan (pengangguran) meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan waktu. Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas

resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Yang digolongkan mencari pekerjaan antara lain :

- a. Mereka yang sedang bekerja, tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan
- b. Mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali, tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah kegiatan seseorang yang tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja (bekerja dan masih mencari pekerjaan). Kegiatan mereka digolongkan ke dalam sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, penduduk yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti misalnya yang sudah lanjut usia, cacat jasmani, atau mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Apabila seseorang mempunyai lebih dari satu kegiatan misalnya sekolah sambil mengurus rumah tangga, hanya dimasukkan ke dalam salah satu golongan di atas menurut waktu terbanyak yang digunakan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah angka yang menunjukkan beberapa tingkat penduduk yang aktif secara ekonomi yang diperoleh dengan membagi besarnya mereka yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap jumlah penduduk di dalam usia kerja.

Rumus:

$$\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100 \%$$

Partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja yang disajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Untuk Laki-laki} : \frac{\text{Angkatan kerja laki-laki umur 15+}}{\text{Jumlah penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas}} \times 100 \%$$

$$\text{Untuk Perempuan} : \frac{\text{Angkatan kerja perempuan umur 15+}}{\text{Jumlah penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas}} \times 100 \%$$

Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Adapun penggolongan lapangan usaha di Indonesia yaitu:

- 1) Pertanian tanaman pangan
- 2) Perkebunan
- 3) Perikanan
- 4) Peternakan
- 5) Pertanian lainnya
- 6) Industri Pengolahan

- 7) Perdagangan
- 8) Jasa
- 9) Angkutan
- 10) Lainnya

Status pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang termasuk dalam golongan bekerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan dan pernah bekerja. Adapun penggolongan status pekerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
- 2) Berusaha dengan dibantu anggota buruh tidak tetap adalah mereka yang dalam mengusahakan usahanya dibantu oleh buruh tidak tetap.
- 3) Berusaha dibantu dengan buruh tetap adalah mereka yang dalam menjalankan usahanya atas resiko sendiri dan dalam usahanya itu mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap yang dibayar.
- 4) Buruh/karyawan/pekerja dibayar adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima gaji/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh tani yang tidak memiliki majikan tertentu, tetap digolongkan sebagai buruh.
- 5) Pekerja tidak dibayar adalah mereka yang bekerja membantu seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan diartikan sebagai alasan karena tidak mempunyai pekerjaan. Termasuk ke dalam kelompok menganggur adalah mereka

yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebastugaskan, tetapi sedang menganggur dan mencari pekerjaan tertentu.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah orang yang mencari pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Rasio beban ketergantungan (dependency ratio). Rasio ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang secara potensial dianggap produktif.

Rumus :

$$\frac{\text{Penduduk (0-14) + Penduduk (65+)}}{\text{Penduduk (15-64)}} \times 100\%$$

2.3 Pendidikan

Bersekolah adalah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah diknas maupun instansi lain. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, termasuk juga tamat/belum tamat Taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Masih bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, baik pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat Sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Kepandaian membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

- a. Orang yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dalam huruf latin ataupun lainnya.
- b. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *Braille* digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
- c. Orang yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacat tidak dapat membaca dan menulis.
- d. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

APS (Angka Partisipasi Sekolah) menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah, pemerataan/akses pendidikan.

- Keunggulan APS:
 - 1) Mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah;
 - 2) Mengukur seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan.

- Kelemahan APS: tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/menikmati pendidikan.

$$\text{APS usia xx} = \frac{\text{Jml penduduk yg masih sekolah usia xx}}{\text{Jumlah penduduk usia xx tahun}} \times 100$$

APK (Angka Partisipasi kasar) menggambarkan anak yang bersekolah pada jenjang tertentu. APK lebih menyoroti anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia.

- Keunggulan APK: mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia.
- Kelemahan APK: tidak dapat melihat di usia berapa seseorang bersekolah/menikmati pendidikan di suatu jenjang tertentu .

$$\text{APK Jenjang x} = \frac{\text{Jumlah penduduk yg masih sekolah di jenjang x}}{\text{Jumlah penduduk usia xx tahun}} \times 100$$

APM (Angka Partisipasi Murni) untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.

- Keunggulan APM: mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu).
- Kelemahan APM: tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun, > 12 tahun yang masih bersekolah di SD/ sederajat.

$$\text{APM jenjang } x = \frac{\text{Jumlah murid jenjang } x \text{ umur } xx \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia } xx \text{ tahun}} \times 100$$

Pemerintah telah menentukan strategi pembangunan yang ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, agar pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih merata dan memadai. Tujuan utama pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Namun, karena keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya manusia, luas wilayah, serta potensi alam yang ada mengakibatkan pencapaian hasil-hasil pembangunan di masing-masing wilayah berbeda.

Dalam hal pembangunan ini, kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang ada memiliki peran penting dalam memajukan suatu daerah. Kualitas penduduk sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal meliputi suasana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kebijakan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Untuk dapat menilai kualitas penduduk diperlukan indikator ataupun ukuran yang dapat menunjukkan kondisi penduduknya.

2.4 Kesehatan

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah,

atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). **Keluhan kesehatan** adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Rumus Angka kesakitan atau Angka Morbiditas adalah sebagai berikut:

$$AM = \frac{JPKK}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

AM : Angka Morbiditas

JPKK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. **Penolong persalinan** adalah pihak yang menolong pada saat proses kelahiran

2.5 Konsumsi dan Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi.

KEPENDUDUKAN

Dependency Ratio

40,87%

3

Sex Ratio **109**

DARI 100 ORANG PENDUDUK
PEREMPUAN TERDAPAT 109
ORANG PENDUDUK LAKI-LAKI



KEPENDUDUKAN

Keadaan penduduk suatu daerah sangat erat hubungannya dengan latar belakang sosial budaya di mana penduduk tersebut berada. Faktor pendidikan, perkawinan, adat istiadat, mata pencaharian dan lain-lain akan berpengaruh terhadap keadaan penduduk suatu masyarakat, sehingga keadaan penduduk yang satu akan berbeda dengan keadaan penduduk masyarakat lainnya.

Pemahaman karakteristik suatu daerah menjadi sangat penting terutama untuk mengetahui sejauh mana terdapat ketimpangan antara pola perkembangan kependudukan dengan tujuan pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Sebagai ilustrasi sederhana, di Kabupaten Ketapang pengaruh sosial budaya/tradisi masih cukup dominan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peranan kaum pria masih cukup dominan sebagai pencari nafkah dibandingkan dengan kaum wanita. Sebaliknya kecenderungan seorang wanita sebagai ibu rumah tangga juga masih cukup dominan. Keadaan ini dapat terlihat baik pada pasangan rumah tangga maupun pada penduduk yang masih belum menikah maupun yang sudah menikah.

Perubahan pada penduduk, atau yang lebih sering disebut perkembangan kependudukan lebih diarahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Faktor-faktor yang

langsung memengaruhi pertumbuhan penduduk secara garis besar dibagi menjadi dua komponen yaitu, komponen yang bersifat alamiah (kelahiran, kematian) dan komponen yang bersifat non alamiah (migrasi masuk/keluar).

3.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin

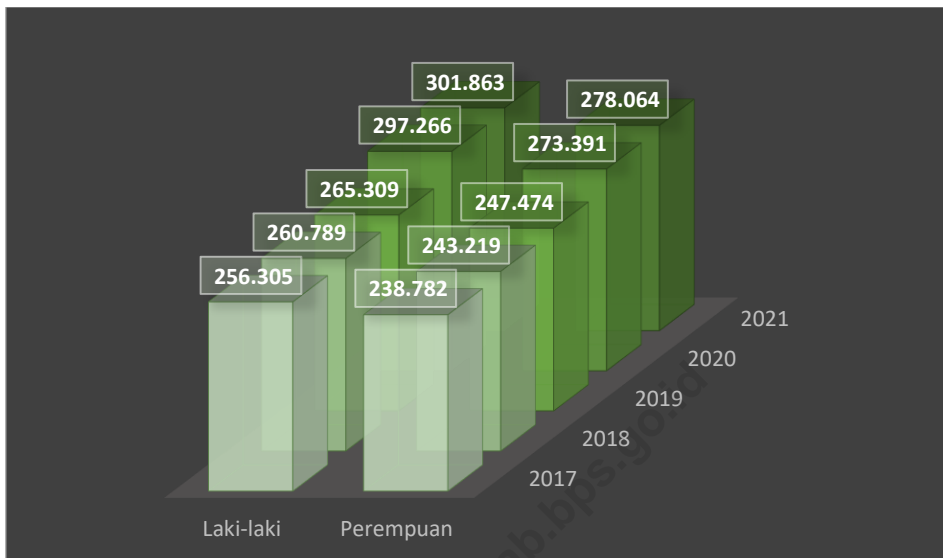
Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 yaitu sebanyak 579.927 jiwa, yang terdiri dari 301.863 jiwa laki-laki dan 278.064 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 109. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 109 orang penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang dapat mencerminkan perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Ketapang, 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk	495.087	504.008	512.783	570.657	579.927
a. Laki-laki	256.305	260.789	265.309	297.266	301.863
b. Perempuan	238.782	243.219	247.474	273.391	278.064
Sex Ratio	107	107	107	109	109

Sumber: BPS, Proyeksi Interim, diolah

Gambar 3.1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ketapang menurut Jenis Kelamin, 2017-2021



Sumber: BPS, Proyeksi Interin, diolah

3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk (*population density*) dapat digambarkan dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Persebaran penduduk di Kabupaten Ketapang masih sangat timpang, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di tiap kecamatan tidak merata. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ketapang masih tergolong sangat sepi, yaitu 18 jiwa/km². Kecamatan Delta Pawan sebagai pusat kota di Kabupaten Ketapang merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 1.246 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Hulu Sungai merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 3 jiwa/km².

Tabel 3.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Ketapang Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kendawangan	5.859	58.441	10,08	9,97
Manis Mata	2.912	35.554	6,13	12,21
Marau	1.160	17.503	3,02	15,09
Singkup	227	8.479	1,46	37,35
Air Upas	793	21.512	3,54	27,13
Jelai Hulu	1.358	20.991	3,62	15,46
Tumbang Titi	1.198	29.332	5,06	24,48
Pemahan	326	5.885	1,01	18,05
Sungai Melayu Rayak	122	15.066	2,60	123,49
Matan Hilir Selatan	1.813	41.076	7,08	22,66
Benua Kayong	349	45.795	7,90	131,22
Matan Hilir Utara	720	20.114	3,47	27,94
Delta Pawan	74	92.213	15,90	1246,12
Muara Pawan	611	18.466	3,18	30,22
Nanga Tayap	1.728	37.098	6,40	21,47
Sandai	1.779	33.011	5,69	18,56
Hulu Sungai	4.685	14.026	2,42	2,99
Sungai Laur	1.651	19.367	3,34	11,73
Simpang Hulu	3.175	37.593	6,48	11,84
Simpang Dua	1.048	9.407	1,62	8,98
Ketapang	31.588	570.657	100,00	18

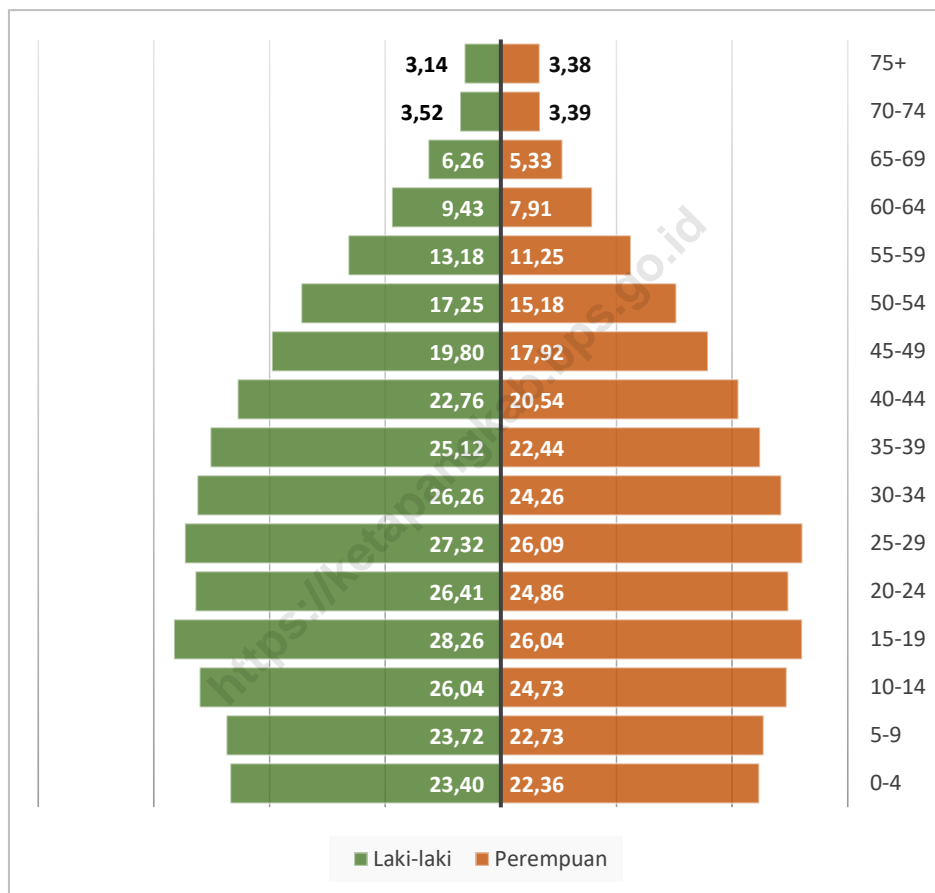
Sumber: BPS, Proyeksi Interin, diolah

3.3 Komposisi Umur Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk menunjukkan persentase terbesar untuk penduduk laki-laki dan perempuan berada pada kelompok umur 15 – 19

tahun (usia remaja) dan 25 – 29 tahun (usia dewasa muda). Piramida tersebut juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya interval usia maka semakin kecil persentase penduduknya.

Gambar 3.2. Piramida Penduduk Kabupaten Ketapang (Ribu Jiwa), 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari perbandingan jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat dilihat bahwa Kabupaten Ketapang memiliki struktur umur muda. Jumlah penduduk muda masih memberikan kontribusi terbesar, dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 71,05 persen. Sementara kontribusi penduduk Kabupaten Ketapang dibawah usia 15 tahun sebesar 24,64 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 4,31 persen.

3.4 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat suatu keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan. Hal ini dapat tercermin dengan semakin menurunnya proporsi atau jumlah penduduk usia tidak produktif, yaitu kelompok usia 0 – 14 dan 65 tahun ke atas. Semakin kecil angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) akan menambah peluang atau kesempatan bagi penduduk usia produktif (umur 15-64) untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuannya.

Rasio Ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) Kabupaten Ketapang mencapai 40,87 persen yang terdiri dari rasio ketergantungan anak 35,08 persen dan rasio ketergantungan lanjut usia 5,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 40-41 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 3.3. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Ketapang, 2021

Uraian	Jumlah
1. Kelompok Umur:	
0 – 14 tahun	142.977
15 – 64 tahun	412.256
65 tahun atau lebih	25.029
2. Rasio Ketergantungan	40,75
Rasio Ketergantungan Anak	34,68
Rasio Ketergantungan Lansia	6,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.5 Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk pria dan wanita harus sudah berusia minimal 19 tahun, dimana

semula batas usia minimal adalah 16 tahun. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan PPPA, dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Secara umum banyak penduduk usia muda di pedesaan yang sudah melangsungkan perkawinannya dibandingkan di perkotaan. Penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 sebagian besar atau 63,26 persennya berstatus kawin dan 30,81 persen berstatus belum kawin, artinya 6 dari 10 penduduk yang berusia 10 tahun ke atas sudah berstatus kawin di Kabupaten Ketapang.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ketapang, 2021

Status Perkawinan	Jenis Kelamin (Persen)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	35,33	25,92	30,81
Kawin	60,83	65,89	63,26
Cerai	3,84	8,19	5,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, persentase penduduk di Kabupaten Ketapang yang berstatus kawin di dominasi oleh penduduk perempuan, yaitu 6 dari 10 perempuan berusia 10 tahun keatas statusnya kawin dan hanya 2 sampai 3 dari 10 penduduk perempuan yang berstatus belum kawin.



PENDIDIKAN

"Anak perempuan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan SMA sesuai umurnya dibandingkan anak laki-laki"

APM



96,94%



71,3%



46,73%

SCHOOL



PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan penduduk juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi akan cenderung lebih mudah untuk menerima dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi agar perekonomiannya tidak selalu tergantung kepada alam. Dengan demikian, masyarakat dengan pendidikan yang memadai diharapkan mampu menjadi sumber daya yang sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai kesejahteraan.

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, ras, gender, maupun agama. Hal ini dimuat dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 31 ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selain merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan juga merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan juga memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kualitas dan kemajuan suatu negara. Tanpa

adanya pendidikan yang memadai, tidak akan tercipta SDM yang berkualitas dan negara yang maju.

Klasifikasi pendidikan dibedakan dua kelompok yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Secara umum pendidikan formal sangat berpengaruh positif daripada pendidikan informal terhadap pasar kerja. Sejauh ini pendidikan formal merupakan prasyarat utama dalam memilih bidang pekerjaan yang akan ditekuni, dan pendidikan informal hanya bersifat penunjang. Tingkat pendidikan mempunyai korelasi positif dengan tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung semakin besar peluang untuk menerima pendapatan yang lebih tinggi.

4.1 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, beberapa diantaranya adalah banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah, Angka Partisipasi Sekolah serta Angka Partisipasi Murni. Semakin besar nilai indikator tersebut, semakin baik pula partisipasi masyarakat untuk bersekolah. Pada dasarnya, tingkat partisipasi sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ketersediaan fasilitas pendidikan dan faktor sosial ekonomi rumah tangga. Tersedianya fasilitas pendidikan erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana/prasarana pendidikan. Sedangkan faktor sosial ekonomi adalah meliputi kemampuan ekonomi para orang tua untuk terus menyekolahkan anaknya yang masuk dalam usia sekolah.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ketapang, 2021

Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	0,98	37,17	12,60	14,92	34,33
Perempuan	1,28	37,14	14,51	16,28	30,79
Laki-laki + Perempuan	1,2	37,15	13,51	15,75	32,64

Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan tabel 4.1, penduduk berumur 7-24 tahun didominasi oleh penduduk yang memiliki status masih bersekolah, yakni sebesar 66,41 persen dengan rincian 37,15 persen di jenjang SD/sederajat, 13,51 persen di jenjang SMP/sederajat, dan 15,75 persen di jenjang SMA/sederajat, serta 32,64 persen dari penduduk umur 7-24 tahun tidak bersekolah lagi. Selain itu, terdapat 1,2 persen penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan pendidikan yang ada, atau penduduk usia sekolah yang masih bersekolah. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Tingginya APS dan APM dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas

jangkauan pelayanan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia dan merata tiap jenjang atau tingkat pendidikan, yakni dari SD sampai SMA.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Jenis Kelamin	APS		
	Usia SD (7-12)	Usia SMP (13-15)	Usia SMA (16-18)
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	97,75	93,37	64,18
Perempuan	99,4	94,46	64,92
Laki-Laki + Perempuan	98,53	93,87	64,61

Sumber: Susenas 2021

Dari tabel 4.2, diatas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk umur 7-12 tahun di Kabupaten Ketapang sebesar 98,53 persen. APS untuk umur 13-15 tahun sebesar 93,87 persen, sedangkan APS untuk umur 16-18 tahun sebesar 64,61 persen. APS penduduk 7-12 tahun atau setara dengan usia sekolah dasar (SD) di Ketapang belum mencapai 100 persen baik laki-laki maupun perempuan, hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat anak yang berumur 7-12 tahun yang belum menempuh pendidikan SD atau terdapat anak usia sekolah SD yang putus sekolah tahun 2021.

APS untuk umur 16 -18 tahun masih tergolong rendah, masih terdapat 3 sampai 4 dari 10 orang penduduk yang berumur 16-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa APS penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ketapang relatif hampir sama, hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Ketapang, 2021

Jenis Kelamin	APM		
	Usia SD (7-12)	Usia SMP (13-15)	Usia SMA (16-18)
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	96,17	67,71	45,7
Perempuan	97,8	75,55	47,47
Laki-Laki + Perempuan	96,94	71,3	46,73

Sumber: Susenas 2021

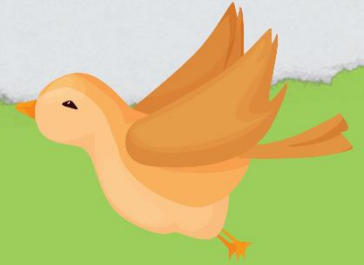
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan fasilitas sekolah dasar sesuai dengan jenjangnya di Ketapang sudah cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya APM SD yaitu sebesar 96,94 persen, artinya 9 dari 10 penduduk sudah bersekolah pada jenjang dan umur yang sesuai, yaitu jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Namun, untuk pemanfaatan jenjang pendidikan SMP dan SMA masih tergolong rendah, Nilai APM untuk SMP dan SMA masing-masing sebesar 71,3 persen dan 46,73 persen. Seiring bertambahnya umur, nilai APM terus mengalami penurunan, pola yang sama juga ditunjukkan oleh APS. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, salah satunya adalah karena jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan membutuhkan biaya yang lebih banyak dan kemauan yang lebih besar. Selain itu, akses pendidikan juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai APM yang lebih tinggi dibutuhkan peran serta dari masyarakat maupun pemerintah.

Selanjutnya, dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan pada kelompok usia SMA (16-18 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan

APM laki-laki. APM SMA perempuan sebesar 47,47 persen sedangkan laki-laki sebesar 45,7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa anak perempuan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan SMA sesuai umurnya dibandingkan anak laki-laki. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya adalah karena faktor ekonomi yang menuntut anak laki-laki untuk bekerja. Hal ini didukung dengan tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, yakni sebesar 83,75 persen, sedangkan TPAK penduduk berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 43,83 persen.

<https://ketapangkab.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN



Lapangan pekerjaan di dominasi oleh sektor pertanian yaitu 5 sampai 6 orang dari 10 penduduk yang bekerja di Ketapang bekerja di sektor pertanian.

5



KETENAGAKERJAAN

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, akan terjadi pertambahan jumlah angkatan kerja. Perihal ini perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja (labour market) yang cukup, dan jika tidak tentunya akan terjadi lonjakan angka pengangguran (unemployment) dengan berbagai karakteristiknya karena tidak sebandingnya antara demand dan supply pencari kerja terhadap lowongan kerja. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Ketersediaan lapangan pekerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam hal ketenagakerjaan, kesempatan kerja bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Oleh karena itu, peluang kesempatan kerja yang semakin banyak akan meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu daerah sehingga semakin meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sebaliknya, kesempatan kerja yang tidak

selaras dengan pertumbuhan tenaga kerja yang ada, tentu akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan masalah-masalah sosial.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Ketapang, dalam bab ini akan disajikan situasi terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Ketapang.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sebelum masuk ke bahasan TPAK dan TPT, seperti diketahui bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021 di Kabupaten Ketapang, jumlah penduduk angkatan kerja sekitar 252.375 orang dan 139.239 orang merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif bekerja berjumlah sekitar 234.852, 158.286 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 76.566 orang berjenis kelamin perempuan. Dari total penduduk angkatan kerja, terdapat sekitar 17.523 orang merupakan pengangguran di Ketapang.

Tabel 5.1. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Ketapang, 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk 15+	202.244	189.370	391.614
Angkatan Kerja	169.370	83.005	252.375
Bekerja	158.286	76.566	234.852
Pengangguran	11.084	6.439	17.523
Bukan Angkatan kerja	32.874	106.365	139.239

Sumber: Sakernas Agustus 2021

Lebih lanjut, untuk mengetahui partisipasi aktif angkatan kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK dan TPT merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Sedangkan TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 5.2. Persentase TPAK dan TPT Kabupaten Ketapang, 2021

Kabupaten Ketapang	TPAK	TPT
Laki-Laki	83,75	6,54
Perempuan	43,83	7,76
Laki-laki + Perempuan	64,44	6,94

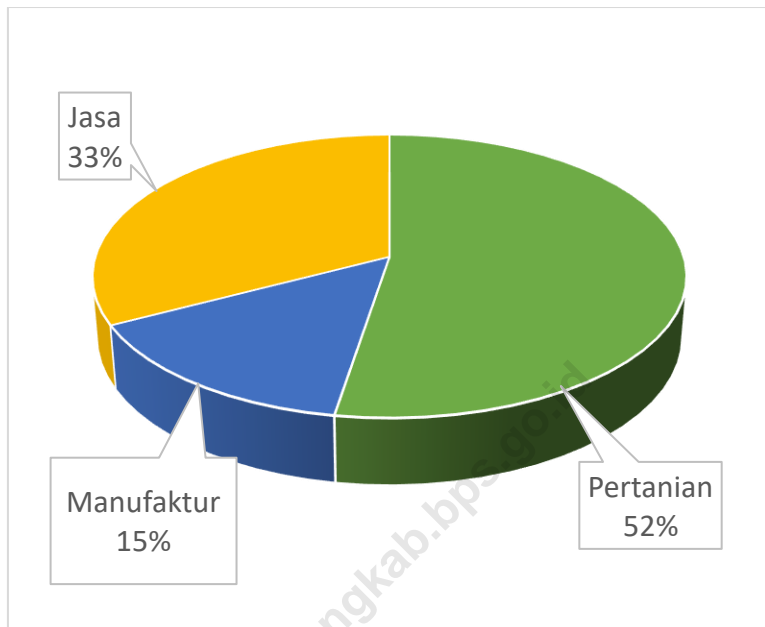
Sumber: Sakernas Agustus 2021

Berdasarkan hasil Sakernas 2021, TPAK Kabupaten Ketapang sebesar 64,44 persen. Dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, terdapat sebanyak 64 sampai 65 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu atau dikatakan aktif secara ekonomi. Sementara angka TPT yaitu sebesar 6,94 artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, 7 orang diantaranya merupakan pencari kerja (pengangguran).

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektoral

Lapangan pekerjaan diharapkan menjadi indikator tingkat kegiatan ekonomi suatu wilayah/daerah apakah daerah itu berbasis pertanian atau industri sehingga dapat menunjukkan tingkat perkembangan ekonominya. Dari hasil Sakernas 2021 dapat menunjukkan kontribusi beberapa sektor dalam penyerapan tenaga kerja.

Gambar 5.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Ketapang, 2021



Sumber: Sakernas Agustus 2021

Berdasarkan Gambar 5.1, lapangan pekerjaan di Ketapang didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 52 persen artinya 5 sampai 6 orang dari 10 penduduk yang bekerja di Ketapang bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya sektor jasa menjadi sektor kedua terbesar setelah sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja di Ketapang yaitu sekitar 33 persen kemudian diikuti oleh sektor manufaktur, sebesar 15 persen.

5.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama

Berdasarkan data hasil Sakernas 2021 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan terbanyak yaitu penduduk yang bekerja sebagai karyawan/buruh dengan persentase sebanyak 45,21 persen, lalu diikuti penduduk yang berusaha sendiri 19,34 persen,

kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 12,58 persen. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak perusahaan di bidang pertambangan dan perkebunan yang mendongkrak perekonomian di wilayah Kabupaten Ketapang serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan tingginya status pekerjaan utama penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus sebagai buruh atau karyawan.

Dari persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga dapat dikatakan bahwa sebagian besar pekerja yang berusaha sendiri melibatkan anggota keluarganya untuk ikut membantu memperoleh penghasilan dari hasil usahanya, terutama di sektor pertanian. Hampir semua masyarakat di Ketapang yang bertani/berladang akan dibantu oleh istri/suami dan anak serta keluarganya ketika bekerja. Mereka membantu menjadi pekerja keluarga, terutama penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ketapang, 2021

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	18,64	20,80	19,34
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Pekerja Keluarga/Tidak	15,12	7,33	12,58
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	6,71	0,20	4,59
Buruh/Karyawan/Pegawai	46,93	41,65	45,21
Pekerja Bebas	8,15	1,95	6,13
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	4,45	28,07	12,15

Sumber: Sakernas Agustus 2021

<https://ketapangkab.bps.go.id>

KESEHATAN

Perempuan lebih
rentan mengalami
keluhan kesehatan
dibandingkan dengan
laki-laki



Angka
Kesakitan
4,49%

KESEHATAN

Kesehatan memiliki korelasi positif dengan produktivitas kerja. Kondisi kesehatan harus terus dijaga sebaik mungkin, baik melalui kebersihan lingkungan maupun perbaikan gizi keluarga. Jika kedua faktor tersebut kurang diperhatikan akan beresiko terhadap kesehatan yang cenderung mudah mengalami gangguan kesehatan, atau rentan terhadap gangguan berbagai jenis penyakit. Keberhasilan suatu pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Pelayanan kesehatan harus diperoleh secara mudah, murah dan merata oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia karena hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa diantara upaya tersebut adalah penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan sarana medis yang memadai dan diiringi dengan ketersediaan tenaga medis yang berkualitas, hingga penyuluhan kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki perilaku hidup sehat. Selain itu, pemerintah juga membangun program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemanfaatan semua sarana kesehatan diatas.

Secara umum kesehatan meliputi dua aspek, yaitu kesehatan rohani dan kesehatan jasmani, yang mana keduanya saling berhubungan. Jika salah satunya terganggu maka akan mempengaruhi kesehatan yang lainnya. Kemajuan bidang ekonomi yang diikuti oleh ketatnya persaingan memiliki kecenderungan mempengaruhi kesehatan rohani. Sementara kesehatan jasmani salah satunya dapat dipengaruhi oleh alam atau cuaca, lingkungan kumuh yang memungkinkan berkembang biaknya bakteri, dan kekurangan gizi (malnutrisi).

Kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang berada dibawah batas kecukupan dan disertai dengan jumlah anggota rumah tangga yang relatif banyak, lahan perkarangan sempit dan atau padat hunian, berpeluang menciptakan pola konsumsi jauh dibawah standar kecukupan gizi dan bermukim pada lingkungan kumuh. Kondisi lingkungan tersebut sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit, dan masih banyak dijumpai di negara berkembang, sehingga jenis penyakit yang umum diderita masyarakat menengah kebawah adalah malaria, diare, tetanus, polio, difteria, dan batuk kategori kronis.

6.1 Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik yang sehat dan kuat. Kondisi fisik yang baik membuat segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar, seperti sekolah, bekerja, mengurus rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan yaitu angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu persentase jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk di Kabupaten Ketapang sebesar 4,49 persen, artinya terdapat 4 sampai 5 dari 100 penduduk mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan aktivitasnya terganggu. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih rentan mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki yaitu sekitar 4,95 persen dan 4,06 persen secara berturut-turut.

Tabel 6.1. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Ketapang, 2021

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (Persen)
(1)	(2)
Laki-Laki	4,06
Perempuan	4,95
Laki-laki + Perempuan	4,49

Sumber: Susenas 2021

6.2 Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), prinsip asuransi sosial meliputi: 1) kegotong-royongan antara yang kaya dan

miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; 2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 3) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; 4) bersifat nirlaba.

Jaminan kesehatan biasanya digunakan pada kegiatan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota ruta. Menurut hasil Susenas 2021 yang ditunjukkan pada tabel 6.2, sebanyak 35,47 atau 3 sampai 4 dari 10 penduduk di Kabupaten Ketapang sudah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

Tabel 6.2. Presentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Ketapang, 2021

Jenis Kelamin	Pengguna Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
Laki-Laki	26,43
Perempuan	40,19
Laki-Laki + Perempuan	35,47

Sumber: Susenas 2021

FERTILITAS



64,76%

melahirkan di
fasilitas kesehatan

84,85%

persalinan dibantu
oleh tenaga kesehatan



7

FERTILITAS

Jumlah penduduk yang besar bagi suatu daerah menjadi beban sekaligus merupakan modal bagi pembangunan. Penduduk yang besar akan menjadi beban jika tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Meskipun kualitas sumber daya manusia sudah baik, jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, akan berakibat yang sama bagi daerah itu sendiri.

Oleh sebab itu ada usaha dari pemerintah untuk mengatur pertumbuhan jumlah penduduk, dengan melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB). Tujuan Keluarga Berencana Nasional adalah tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera, melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah penduduk. Selain itu, riwayat kesehatan balita dan riwayat proses persalinan bagi wanita yang pernah melahirkan juga sangat penting untuk dijadikan tolak ukur untuk melihat keberhasilan suatu program pemerintah terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

7.1 Pemakaian Alat KB

Sebagai salah satu upaya mewujudkan program Keluarga Berencana, pasangan suami istri dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Ada beberapa alat kontrasepsi yang dipakai dalam masyarakat, yaitu :

1. IUD (*Intra Uterus Device*) adalah alat kontrasepsi yang dipasang didalam rahim untuk mencegah kehamilan.

2. Suntikan KB adalah sesuatu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikan cairan tertentu kedalam tubuh.
3. Susuk KB / Implant adalah alat kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit lengan atas untuk mencegah kehamilan.
4. Pil KB adalah pil yang diminum untuk mencegah kehamilan.
5. Kondom (Karet KB) adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh laki-laki selama bersenggama dengan tujuan agar pasangannya tidak menjadi hamil.
6. MOW (Medis Operasi Wanita) dan MOP (Medis Operasi Pria) adalah suatu operasi yang dilakukan untuk mencegah kehamilan.

Banyaknya wanita berusia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Ketapang pada Tahun 2021 secara rinci diuraikan dalam Gambar 7.1.

Gambar 7.1. Persentase Wanita Usia 15 – 49 Tahun Menurut Penggunaan Alat KB di Kabupaten Ketapang, 2021



Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan data Susenas tahun 2021, sebanyak 72,41 persen wanita usia subur (15-49 tahun) di Kabupaten Ketapang sedang menggunakan alat KB, 21,07 persen tidak pernah menggunakan alat KB sedangkan 6,51 persen lainnya pernah menggunakan alat KB.

Tabel 7.1. Persentase Penduduk Umur 0 – 59 Bulan (balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ketapang, 2021

Jenis Kelamin	Memiliki Kartu Imunisasi*	Mendapat Imunisasi Lengkap
Laki-laki	82,55	50,75
Perempuan	90,51	49,59
Laki-laki+Perempuan	86,48	50,18

Sumber: Susenas 2021

*) Memiliki Kartu Imunisasi baik yang dapat ditunjukkan maupun tidak dapat ditunjukkan

Berdasarkan tabel 7.1 di atas, 8 sampai 9 orang dari 10 balita di Kabupaten Ketapang memiliki kartu imunisasi (86,48%) akan tetapi hanya 5 dari 10 balita yang mendapat imunisasi lengkap (50,18%). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin balita, sebanyak 8 sampai 9 dari 10 balita laki-laki sudah memiliki kartu imunisasi (82,55%), namun hanya 5 balita yang sudah mendapat imunisasi lengkap (50,75%). Sedangkan pada balita perempuan, sebanyak 9 dari 10 balita perempuan sudah memiliki kartu imunisasi (90,51%) , namun hanya 4 sampai 5 balita yang sudah mendapat imunisasi lengkap (49,59%). Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran para orang tua untuk memberikan imunisasi lengkap kepada anak-anak balita yang mereka miliki. Diperlukan upaya bersama untuk terus mensosialisasikan pentingnya imunasi bagi balita guna

mencegah penyakit dan untuk meningkatkan taraf kesehatan balita. Berikut jenis imunisasi yang diberikan kepada balita.

Tabel 7.2. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Ketapang, 2021

Jenis Kelamin	BCG	DPT	Polio	Campak/MMR	Hepatitis B
Laki-laki	84,62	79,11	85,98	65,63	78,03
Perempuan	87,10	76,68	85,16	64,16	78,24
Laki-laki + Perempuan	85,85	77,91	85,07	64,90	78,13

Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan tabel 7.2 di atas, terlihat bahwa balita yang menerima vaksin campak/MMR memiliki tingkat persentase terendah yaitu sebesar 64,90 persen, kemudian hanya 78,13 persen balita yang sudah menerima vaksin Hepatitis B, 77,91 persen balita sudah menerima vaksin DPT, 85,07 persen balita menerima vaksin polio serta 85,85 persen balita yang sudah menerima vaksin BCG.

Tabel 7.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Riwayat Melahirkan di Kabupaten Ketapang, 2021

Riwayat Melahirkan	Persentase
Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	64,76
Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	84,85

Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan tabel 7.3 di atas, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 64,76 persen yang artinya masih terdapat perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan terdekat (melahirkan di rumah atau tempat lainnya). Jika dilihat dari penolong proses persalinan, wanita yang melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 84,85 persen artinya masih terdapat 15,15 persen yang penolong kelahirannya bukan tenaga kesehatan.

<https://ketapangkab.bps.go.id>



Perumahan

8 dari 10

**rumah tangga memiliki
fasilitas buang air
besar sendiri**

91%

**rumah tangga
memiliki rumah
sendiri**



<https://ketapangkab.bps.go.id>

PERUMAHAN

Salah satu kebutuhan pokok (primer) manusia agar dapat hidup layak adalah tercukupinya kebutuhan perumahan disamping kebutuhan pangan dan sandang. Sudah sejak dulu pemenuhan kebutuhan perumahan adalah yang tersulit diantara pemenuhan kebutuhan yang lain, karena perumahan yang diinginkan tentunya tidak asal perumahan, melainkan perumahan yang layak agar dapat hidup nyaman dan tentram.

Kondisi fisik dan lingkungan sekitar perumahan merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kondisi fisik perumahan dan lingkungannya akan semakin sehat dan sejahtera masyarakatnya. Perumahan yang sehat adalah perumahan yang memenuhi persyaratan layak, seperti: kesehatan, keamanan dan keindahan. Persyaratan ini jika terpenuhi akan mempunyai dampak positif terhadap kesehatan lingkungan, oleh karenanya antara perumahan dan lingkungan sekitar merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan.

Ukuran rumah dan lingkungan yang sehat dapat dilihat dari beberapa segi antara lain kondisi fisik perumahan dan fasilitas yang ada. Kondisi fisik adalah kondisi bangunan seperti: atap, lantai, dan dinding. Sedangkan fasilitas perumahan meliputi penerangan, dan fasilitas lain yang terkait dengan aspek kesehatan lingkungan. Berikut ini akan

diuraikan berbagai hal mengenai sarana dan prasarana perumahan di Kabupaten Ketapang.

8.1 Status Kepemilikan

Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator awal yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, dimana tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan individu atau rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah, kondisi ekonomi sangat berpengaruh terlebih pada era modern saat ini harga perumahan sangatlah tinggi. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan fasilitas perumahan, di mana bagi mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah layak huni dengan mudah.

Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri relatif lebih mapan dibandingkan dengan rumah tangga yang menguasai rumah kontrak atau sewa. Berdasarkan data hasil Susenas 2021, dilihat dari sisi penguasaan atau status bangunan rumah tempat tinggal terdapat sebanyak 90,85 persen rumah tangga telah memiliki rumah sendiri, sedangkan hanya 9,15 persen rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.

Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Penguasaan Tempat Tinggal, 2021



Sumber: Susenas 2021

8.2 Sumber Air Utama

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan mandi, cuci, dll. Tersedianya air bersih untuk seluruh kabupaten Ketapang terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Mulai dari daerah perkotaan hingga daerah hulu.

Tabel 8.1. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Sumber Utama Memasak dan MCK, 2021

Sumber Air Utama	MCK
(1)	(2)
Air kemasan/ Isi ulang	-
Leding	7,18
Sumur bor/ Pompa	9,51
Sumur/ Mata air terlindung	30,28
Sumur/ Mata air tidak terlindung	32,65
Lainnya*	20,28
Jumlah	100

*Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll.

Sumber: Susenas 2021

Berdasarkan Tabel 8.1, sumber utama air untuk MCK yang banyak digunakan rumah tangga di Kabupaten Ketapang adalah sumur/mata air tidak terlindung dengan persentase sekitar 32,65 persen, dan sumur/mata air terlindung sekitar 30,28 persen.

8.3 Sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK)

Lingkungan perumahan yang higienis secara langsung menggambarkan kondisi kesehatan penghuninya, dan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan tercermin dari bagaimana cara hidup dengan sanitasi yang baik seperti; fasilitas buang air besar, tempat penampungan akhir limbah manusia (tinja), dan jenis jamban yang biasa digunakan. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga di Kabupaten Ketapang yang memiliki jamban sendiri adalah

sebesar 83,25 persen, sedangkan 16,65 persen rumah tangga belum memiliki fasilitas maupun menggunakan WC umum sebagai tempat buang air besar sekitar.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2021

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Rumah Tangga
(1)	(2)
Sendiri	83,25
Lainnya*	16,65
Jumlah	100

*Lainnya termasuk MCK Umum dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar

Sumber: Susenas 2021

Mengenai jenis jamban yang tergolong baik adalah jamban yang terbuat dari bahan porselin atau semen dengan sedikit genangan air pada tempat jongkok, bentuknya sebangun leher angsa yang berfungsi sebagai penghambat udara tidak sedap (gas) yang dihasilkan dari tangki/bak penampungan limbah. Dalam batas toleransi tertentu gas tersebut mudah terbakar. Berdasarkan dari kriteria tersebut, persentase rumah tangga pada tahun 2021 yang telah menggunakan jamban yang memenuhi standar kesehatan ada sekitar 93,92 persen. Selebihnya masih menggunakan jenis jamban kategori kurang aman seperti plengsengan, cemplung/cubluk, dan lainnya yaitu sebanyak 6,08 persen.

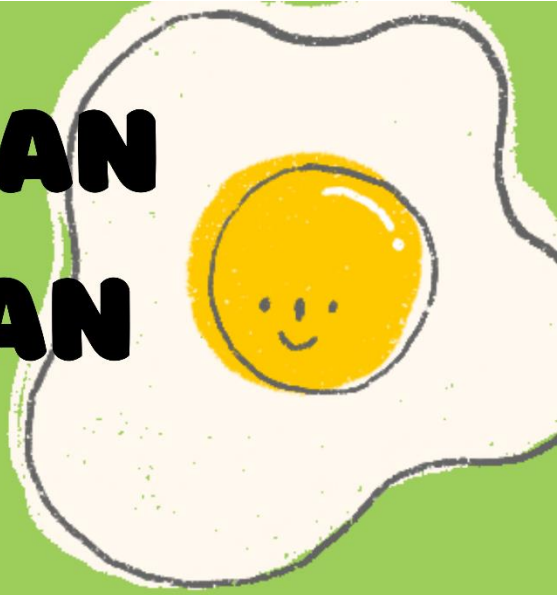
Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Ketapang Menurut Jenis Kloset, 2021

Jenis Kloset (1)	Rumah Tangga (2)
Leher Angsa	93,92
Lainnya	6,08
Jumlah	100

Sumber: Susenas 2021

<https://ketapangkab.bps.go.id>

KONSUMSI DAN PENGELUARAN



Pola konsumsi untuk makanan penduduk Kabupaten Ketapang masih lebih tinggi dibanding pola konsumsi untuk bukan makanan.



KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Indikator sosial yang paling menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat pendapatan. Pendapatan penduduk per kapita mencerminkan produktivitas individu dalam bekerja. Pendapatan merupakan titik akhir dari beberapa indikator sosial yang dibahas dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ketapang 2021.

Hingga saat ini pengumpulan data secara khusus yang menjangkau tingkat pendapatan penduduk diakui sangat sulit dilakukan dan datanya kurang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa survei khusus yang menyoroti tentang pendapatan penduduk menghasilkan data yang bias, dan cenderung kurang mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Faktor keengganan rumah tangga untuk memberi jawaban akurat banyak dijumpai pada saat pendataan. Sebagian besar responden enggan mengemukakan pendapatannya dengan jujur karena dibayangi oleh unsur pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Dampak negatif terhadap data yang dihasilkan adalah jawaban responden cenderung lebih kecil daripada pendapatan riil yang biasanya diterima.

Bertolak dari permasalahan di atas, juga mengingat pentingnya data pendapatan penduduk untuk menghitung indikator sosial ekonomi penduduk, maka BPS berupaya menggali data pendapatan yang dianggap representatif yaitu melalui pendekatan variabel pengeluaran atau konsumsi seluruh anggota rumah tangga (*proxy variable*) selama seminggu yang lalu untuk kelompok konsumsi makanan, selama sebulan dan

setahun yang lalu untuk kelompok konsumsi nonmakanan. Kedua komponen pengeluaran tersebut selanjutnya diimputasi ke pengeluaran rata-rata rumah tangga per kapita per bulan, baik untuk pengeluaran makanan, non makanan, maupun gabungan keduanya.

Adapun yang tidak termasuk konsumsi rumah tangga adalah segala jenis pengeluaran yang tidak dinikmati langsung oleh seluruh anggota rumah tangga seperti; memberi hadiah, meminjamkan uang, membayar arisan, memasak makanan untuk dijual (usaha) atau diberikan kepada pihak lain, merehab rumah berskala besar (investasi), dan sejenisnya.

9.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Konsumsi makanan mencakup seluruh pengeluaran di dalam maupun di luar rumah yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri. Konsumsi makanan meliputi makanan pokok dan makanan tambahan termasuk penganan kecil. Konsumsi nonmakanan meliputi pengeluaran untuk kebutuhan sandang, papan, dan lainnya. Papan atau konsumsi perumahan mencakup: rekening listrik, ledeng, kontrak/sewa/perkiraan sewa rumah, perbaikan ringan rumah, dan sejenisnya. Sandang dan lainnya mencakup konsumsi pembelian pakaian jadi dan alas kaki, pajak bumi dan bangunan, biaya pendidikan, transportasi, asuransi bukan bersifat menabung, biaya pesta/keagamaan selain konsumsi tamu, dan sejenisnya.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Menurut hasil Susenas 2021, pola konsumsi

untuk makanan penduduk Kabupaten Ketapang masih lebih tinggi dibanding pola konsumsi untuk bukan makanan. Pengeluaran rata-rata perkapita untuk makanan yaitu sebesar 652.330 rupiah (55,05 persen), sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita untuk bukan makanan sebesar 532.729 rupiah (44,95 persen) dari pengeluaran dialokasikan untuk bahan bukan makanan. Rincian pengeluaran perkapita perbulan disajikan pada tabel 9.2 untuk pengeluaran makanan dan tabel 9.3 pengeluaran bukan makanan.

Tabel 9.1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Di Ketapang, 2021

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
Makanan	652.330	55,05
Bukan Makanan	532.729	44,95

Sumber: Susenas 2021

Tabel 9.2. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Ketapang, 2021

Kelompok Makanan	Rata-rata Pengeluaran (Rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran
(1)	(2)	(3)
Padi-padian	82.363	12,63
Umbi-umbian	5.942	0,91
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	99.019	15,18
Daging	33.631	5,16
Telur dan Susu	40.950	6,28
Sayur-sayuran	68.099	10,44
Kacang-kacangan	10.463	1,60
Buah-buahan	17.017	2,61
Minyak dan Lemak	14.735	2,26
Bahan Minuman	25.184	3,86
Bumbu-bumbuan	21.385	3,28
Konsumsi Lainnya	13.741	2,11
Makanan dan Minuman Jadi	122.088	18,72
Rokok dan Tembakau	97.715	14,98
Jumlah	652.332	100

Sumber: Susenas 2021

Tabel 9.3. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Ketapang, 2021

Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran (Rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran
(1)	(2)	(3)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	329.111	61,78
Aneka Barang dan Jasa	107.584	20,19
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	27.130	5,09
Barang Tahan Lama	28.179	5,29
Pajak, Pungutan dan Asuransi	35.503	6,66
Keperluan Pesta dan Upacara /Kenduri	5.222	0,98
Jumlah	532.729	100

Sumber: Susenas 2021

9.2 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Ketapang 2021

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami hampir semua negara maju maupun negara berkembang, tak terkecuali di Ketapang. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk melihat seberapa jauh pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM), di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Didalam kemiskinan dikenal beberapa indeks, yaitu:

1. *Head Count Index* (HCI-P0) atau dikenal sebagai persentase penduduk miskin, P0 merupakan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).
2. *Poverty Gap index* (P1) atau Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity index* (P2) atau Indeks Keparahan Kemiskinan, memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Besaran jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan, atau yang biasa disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 495.526,- per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah

garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berikut perbandingan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021.

Tabel 9.4. Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Garis kemiskinan (Rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	451.173	7,66	0,76	0,14
Bengkayang	372.793	6,48	0,80	0,14
Landak	395.486	10,99	1,29	0,26
Mempawah	387.948	5,18	0,52	0,11
Sanggau	363.714	4,55	0,62	0,16
Ketapang	482.824	10,13	1,42	0,32
Sintang	593.844	9,28	1,46	0,34
Kapuas Hulu	481.826	8,93	0,94	0,15
Sekadau	351.726	6,26	0,78	0,14
Melawi	570.434	12,01	2,21	0,62
Kayong Utara	321.356	9,33	1,78	0,46
Kubu Raya	431.211	4,34	0,47	0,10
Kota Pontianak	578.615	4,58	0,68	0,20
Kota Singkawang	527.892	4,83	0,73	0,17
KALIMANTAN BARAT	483.454	7,15	1,03	0,23

Sumber: BPS Prov Kalbar, diolah

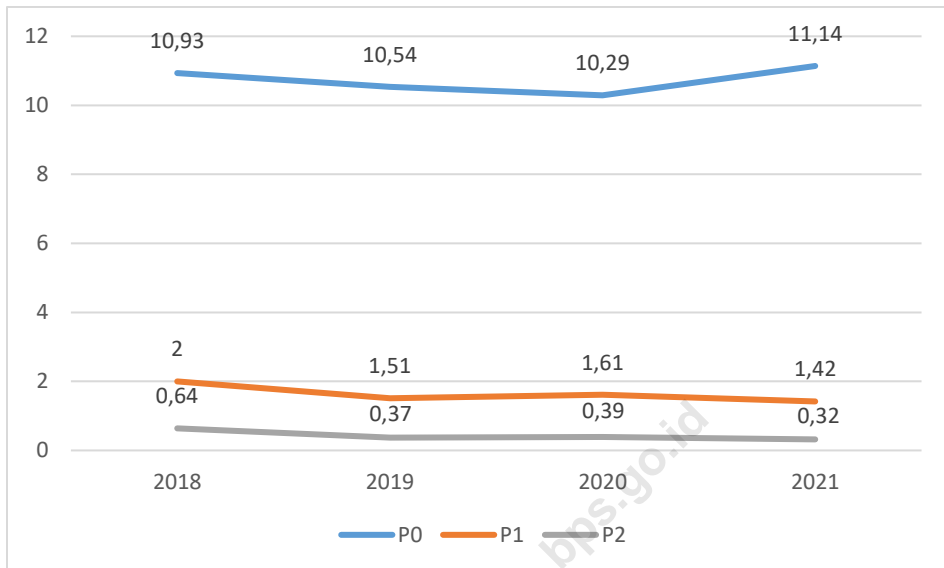
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 adalah sekitar 10,13 persen. Angka ini merupakan peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Melawi (12,01 persen) dan kabupaten Landak (10,99 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Ketapang masih rendah,

yakni merupakan ketiga terbawah se-Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang bernilai 1,42 menjadikan Kabupaten Ketapang sebagai kabupaten dengan kemiskinan terdalam keempat di Provinsi Kalimantan Barat. Nilai indeks kedalaman kemiskinan yang lebih kecil mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung lebih mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin dan tidak miskin juga lebih kecil. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 merupakan yang keempat terjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin dan tidak miskin juga merupakan keempat tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 adalah sebesar 0,32 juga merupakan tertinggi keempat di Provinsi Kalimantan Barat. Nilai indeks keparahan kemiskinan yang lebih tinggi mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya, selain mengalami ketimpangan yang tinggi dalam hal rata-rata pengeluaran antara penduduk miskin dan tidak miskin, rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri juga mengalami ketimpangan yang cukup tinggi. Akan tetapi jika kita lihat perbandingan angka kemiskinan khusus Kabupaten Ketapang dalam kurun tiga tahun terakhir, tren kemiskinannya cenderung mengalami perubahan ke arah yang positif yaitu mengalami penurunan, sebagaimana terlihat dalam gambar 9.1 di bawah ini.

Gambar 9.1. Tren Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, 2018-2021



Sumber: BPS Kabupaten Ketapang

Berdasarkan gambar 9.1 di atas, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Ketapang berfluktuasi selama empat tahun terakhir. Namun garis kemiskinan mengalami peningkatan (Rupiah per Kapita per Bulan), diiringi peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk per kapita per bulan. Di tahun 2021, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,85 persen.

Pada tahun 2021 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,19 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Ketapang terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan, artinya semakin dekat pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan.

Dilihat dari tren kemiskinan pada gambar 9.1 di atas, Indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar 0,07, yang artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Ketapang semakin menurun.

<https://ketapangkab.bps.go.id>

10

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



IPM Kabupaten Ketapang menempati urutan kelima se Kalimantan Barat dengan IPM sebesar 67,43 dengan status capaian "sedang"

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator strategis untuk melihat kesuksesan dari suatu kebijakan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat
- 2) Pengetahuan
- 3) Standar hidup layak

Manfaat IPM:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam proses penghitungan IPM, terjadi perubahan metode pengukurannya, hal ini dilakukan karena terdapat alasan yang mendasarinya yaitu:

- Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Adapun indikator yang berubah yaitu:

- Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Keunggulan penghitungan IPM menggunakan model baru yaitu:

- Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

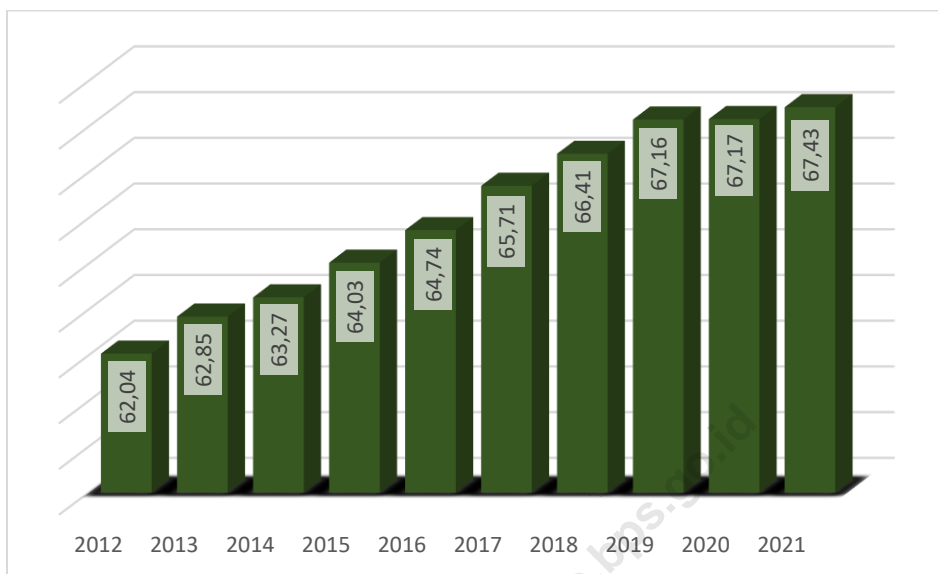
- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

10.1 Perkembangan IPM Ketapang Tahun 2012-2021

Pembangunan manusia di Ketapang terus mengalami kemajuan. Selama 2012 – 2021 IPM Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan 62,04 pada tahun 2012 menjadi 67,43 pada tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2020 IPM Kabupaten Ketapang mengalami perlambatan yang diakibatkan Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Perubahan IPM selama satu dekade terlihat dari Gambar 10.1 berikut, sedangkan perubahan komponen penyusunnya dapat terlihat dari Tabel 10.1.

Gambar 10.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketapang, 2012-2021



Sumber: BPS Prov Kalbar (diolah)

Tabel 10.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketapang Menurut Komponen, 2012-2021

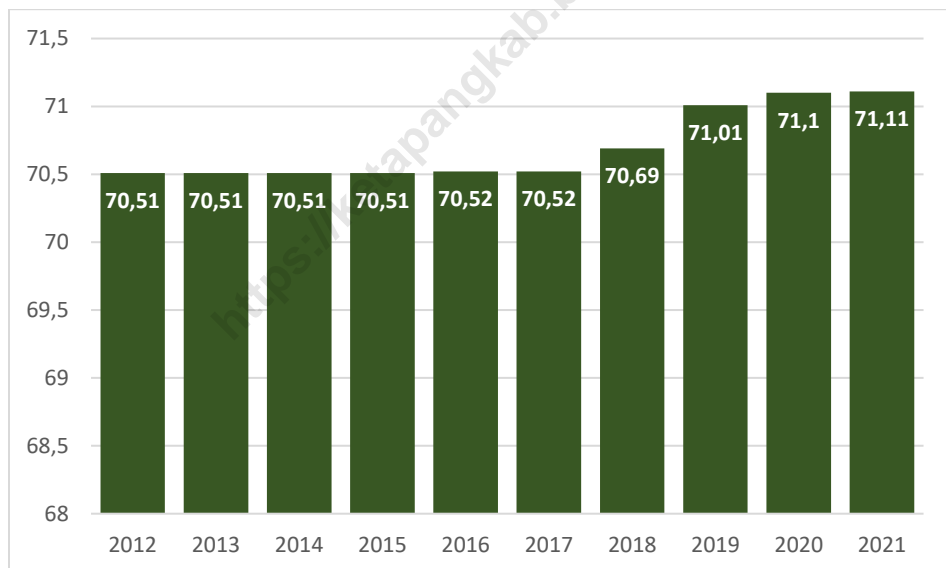
Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,51	70,51	70,51	70,51	70,52	70,52	70,69	71,01	71,10	71,27
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,02	10,61	10,90	10,95	11,34	11,76	11,77	11,79	11,80	11,95
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,09	6,17	6,22	6,56	6,68	7,03	7,04	7,26	7,31	7,48
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp000	8.133	8.146	8.159	8.350	8.430	8.475	8.988	9.259	9.163	9.426
IPM		62,04	62,85	63,27	64,03	64,74	65,71	66,41	67,16	67,17	67,92

Sumber: BPS Prov Kalbar (diolah)

10.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2021 UHH telah meningkat sebesar 0,6 tahun. Pada tahun 2012, Umur Harapan Hidup saat lahir di Ketapang adalah 70,51 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 71,11 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,11 tahun, lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Gambar 10.2. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Ketapang, 2012-2021



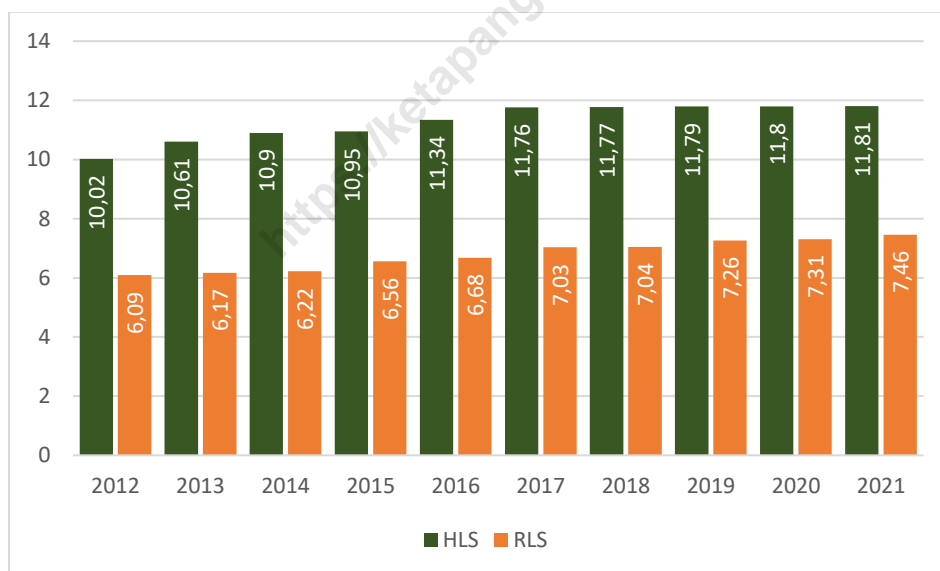
Sumber: BPS Prov Kalbar (diolah)

10.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski pada saat pandemi COVID-19

mengalami sedikit perlambatan. Selama periode 2012 hingga 2021, HLS Kabupaten Ketapang meningkat 1,8 tahun dan RLS meningkat 1,4 tahun. Pada tahun 2021, HLS Ketapang sebesar 11,81 tahun yang artinya pada tahun 2021 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat kelas 3 SMA. Sedangkan RLS Ketapang tahun 2021 sebesar 7,46 tahun yang artinya penduduk umur 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah setara dengan menamatkan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2 atau kelas VIII.

Gambar 10.3. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Ketapang, 2012-2021



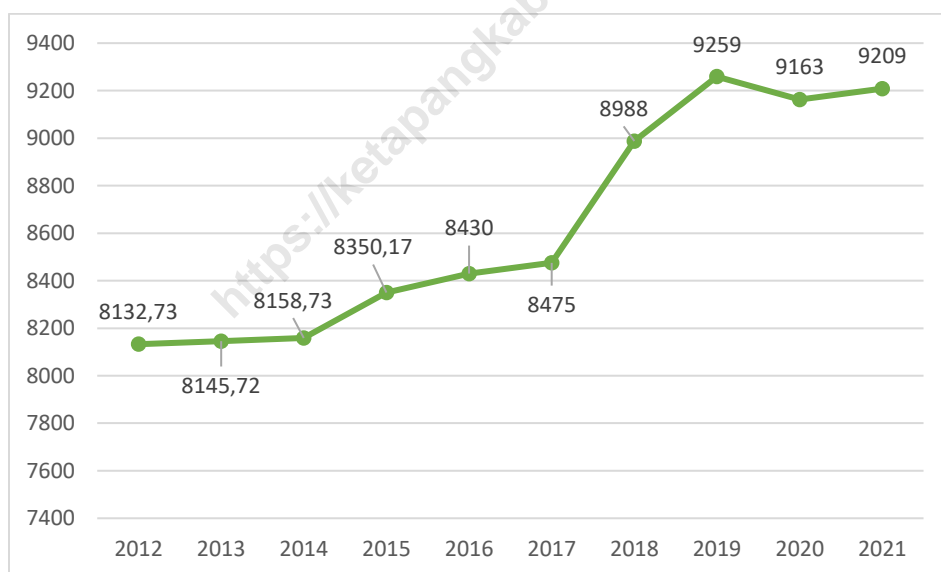
Sumber: BPS Prov Kalbar (diolah)

10.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita

(atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Ketapang mencapai Rp 9,209 juta per tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,5 persen (sekitar Rp46.000), hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat yang mulai stabil dibandingkan tahun sebelum dimana ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat terguncang. Adapun rincian pengeluaran perkapita yang disesuaikan di sajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 10.4. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP), 2012-2021 (Rp000)



Sumber: BPS Prov Kalbar (diolah)

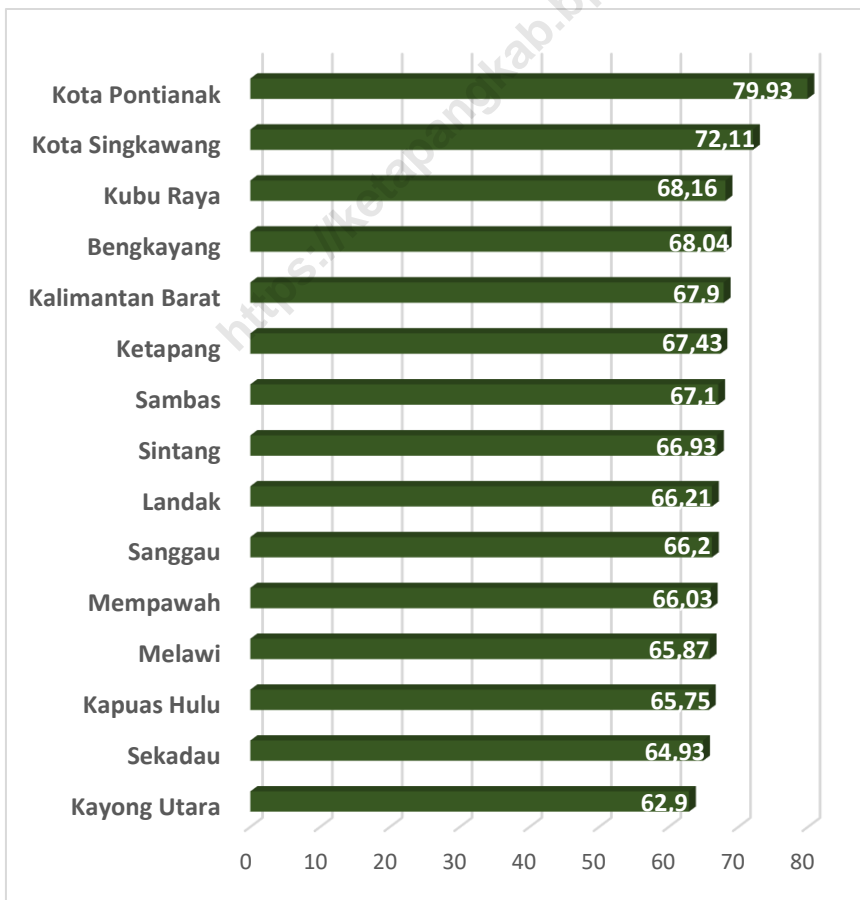
10.2 Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM Tahun 2021 terjadi di seluruh kabupaten/kota. Tidak ada perubahan yang berarti dalam urutan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada tahun 2021. Urutan IPM terendah masih ditempati

oleh Kabupaten Kayong Utara (62,9), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Pontianak (79,93). Kabupaten Ketapang berada di urutan ke 5 dengan IPM sebesar 67,43.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang, dengan status “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) adalah 12 Kabupaten, dan dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$) sudah tidak ada lagi.

Gambar 10.5. IPM Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021



Sumber: BPS Prov Kalbar (diolah)



D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KETAPANG**

Jl. Letjen S. Parman No. 101 Ketapang
Telp. 0534-32107 Fax. 1534-3037840
Email: bps6106@bps.go.id Website: ketapangkab.bps.go.id